

SKRIPSI



GANTI RUGI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM POLRES MAROS

OLEH

ANDI NURFADILA RUKMA

B 111 10 393

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2014

HALAMAN JUDUL

GANTI RUGI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM POLRES MAROS

Oleh:

ANDI NURFADILA RUKMA

B111 10 393

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program
Sarjana Dalam Program Kekhususan Hukum Pidana
Studi Ilmu Hukum**

Pada

BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2014

PENGESAHAN SKRIPSI

GANTI RUGI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM POLRES MAROS

Disusun dan diajukan oleh

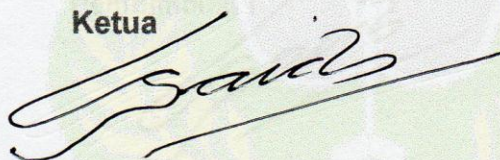
ANDI NURFADILA RUKMA

B 111 10 393

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Jumat, 21 Februari 2014
Dan Dinyatakan Diterima

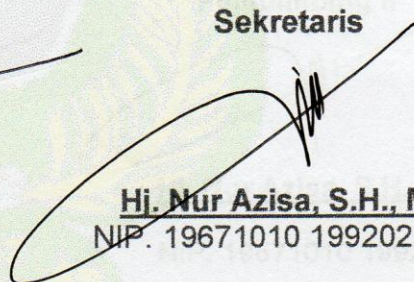
Panitia Ujian

Ketua



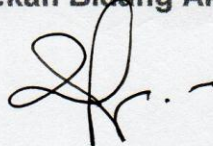
Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H.
NIP. 19620711 198703 1 004

Sekretaris



Hj. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 19671010 199202 2 002

**An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,**



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi tersebut di bawah ini :

Nama : Andi Nurfadila Rukma

Nlm : B111 10 393

Bagian : Hukum Pidana

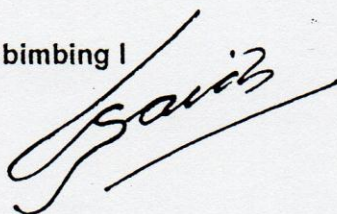
Judul : Ganti Rugi Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan di
Wilayah Hukum Polres Maros

Telah diperiksa dan dapat disetujui oleh pembimbing untuk diajukan dalam ujian
akhir Mahasiswa.

Makassar, 13 Februari 2014

Mengetahui :

Pembimbing I



Prof. Dr. H. M. Said Karim S.H., M.H.

NIP. 19620711 198703 1 004

Pembimbing II



Hj. Nur Azisa, S.H., M.H.

NIP. 19671010 199202 2 002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **ANDI NURFADILA RUKMA**

No. Pokok : B111 10 393

B a g i a n : Hukum Pidana

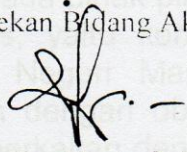
Judul Skripsi : Ganti Rugi terhadap Korban Tindak Pidana
Penganiayaan di Wilayah Hukum Polres Maros

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2014

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,


Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

ABSTRAK

ANDI NURFADILA RUKMA (B111 10 393), dengan judul ***“Ganti Rugi Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Polres Maros”***. Di bawah bimbingan M. Said Karim selaku Pembimbing I dan Nur Azisa selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dapat ditempuh oleh korban tindak pidana penganiayaan dalam rangka pemenuhan haknya untuk mendapatkan ganti rugi dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya pemenuhan ganti rugi bagi korban tindak pidana penganiayaan di Kota Maros.

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dan metode penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di Polres Maros, Kejaksaan Negeri Maros dan Pengadilan Negeri Maros dengan mengambil berkas untuk mengetahui upaya yang dapat ditempuh oleh korban, proses penggabungan perkara dalam pengadilan, dan kendala yang dihadapi dalam upaya pemenuhan ganti rugi bagi korban tindak pidana penganiayaan. Selain itu, Penulis juga mewawancarai/memberikan kuesioner kepada pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang dibahas, yaitu korban, kepolisian di Polres Maros, dan Hakim Pengadilan Negeri Maros. Peneliti juga melakukan pengumpulan data berkenaan dengan objek penelitian dan menelaah buku-buku serta literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

Hasil yang diperoleh Penulis dari penelitian ini, antara lain : 1). Upaya korban penganiayaan mendapatkan ganti rugi atas tindak pidana yang dialaminya lebih memilih jalur non litigasi atau kekeluargaan, 2). Kendala-kendala yang dihadapi korban dalam mengupayakan ganti rugi atas tindak pidana penganiayaan yang dialaminya yaitu, ketidaktahuan masyarakat mengenai adanya Penggabungan Perkara di Tingkat Pengadilan, kurangnya partisipasi pihak kepolisian dalam memberikan informasi hukum kepada masyarakat, dan proses pengadilan yang berbelit-belit.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur Penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, karena atas Karunia, Rahmat dan Petunjuk-Nya lah, Penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini persembahkan dari Penulis sebagai bentuk sumbangan akhir jenjang pendidikan Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang tentu saja berasal dari apa yang pernah Penulis dapatkan selama menjadi mahasiswa. Juga dari hasil penelitian dan diskusi Penulis dengan beberapa narasumber yang terkait dengan tulisan ini dan tentu saja arahan yang diberikan oleh dosen pembimbing terbaik.

Alhamdulillah, berkat pertolongan dan bimbinganNya dan dengan segala pemikiran dan kemampuan yang Penulis miliki, maka skripsi yang berjudul “Ganti Rugi Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Polres Maros” dapat terselesaikan.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan memotivasi Penulis dalam suka maupun duka. Akhir kata dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat yang sebesar-besarnya, Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik bantuan secara moril maupun materiil demi terselesaikannya skripsi ini, yakni kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda **Andi Syahrullah** dan Ibunda **Sukmawati**, atas segala curahan kasih sayang dan motivasi serta doa yang tulus agar Penulis senantiasa menjadi manusia yang bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, Bangsa dan Negara;
2. Kedua adikku tersayang Andi Nur Annisa Rukma dan Andi Nurshireen Hijrani Rukma yang memberikan semangat dan dorongan kepada Penulis;
3. Kakek, nenek, om, tante dan sepupu-sepupuku yang juga telah banyak memberi dukungan dan semangat kepada Penulis;
4. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi, SPBO selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf dan jajarannya;
5. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., D.F.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Bapak Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Romi Librayanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, serta Bapak Achmad S.H., M.H. sebagai Penasehat Akademik Penulis.
7. Bapak Prof. Dr. H. M. Said Karim S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Ibu Hj. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Pembimbing II.

Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, bimbingan, arahan, dan saran kepada Penulis demi terselesaikannya skripsi ini, serta kepada para penguji Bapak Prof. Dr. Muhadar S.H., M.H , Ibu Hj.Haeranah S.H., M.H dan Bapak Kaisar Kamaruddin S.H;

8. Bapak dan Ibu dosen, serta seluruh pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan bantuan sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik;
9. Kepala Kepolisian Resor Kota Maros, beserta staf dan jajarannya, Kepala Pengadilan Negeri Maros beserta staf dan jajarannya yang telah membantu Penulis selama proses penelitian.
10. Sepupuku Muhammad Nur yang senantiasa membantu Penulis mulai mahasiswa baru hingga sampai tahap penyusunan skripsi;
11. Sahabat dan menjadi keluarga baru Penulis selama berada di Fakultas Hukum Unhas, WB's : Dyah Trie Anissa, Roro Ayu Bujarani G, Wadjedah Nursyamsi, Febrina Nurul Wardah, Nuryanto Al-Tadom, Muhammad Fakhry Ibrahim, Andi Adiyat Mirdin, Muh.Hafiluddin, Muh.Riza Hidayat, Andi Azwad Anshari, Nurhadi Halim, Irfai Herman, Mario Husain, Andi Surya Nusantara Djabba, Mahatir Madjid, Muhammad Ansyar, Reyza

Anugerah Basri, Mulhadi HM, Andi Ardian Syahrudin, Muhammad Hidayat Pratama Putra, Rizal Nurhabib Yusuf, Nur Wawan Setiawan;

12. Sahabat Penulis sejak kecil Nur Indah Sari Pratiwi, Emi Hardianti, Annisa Adhania Rusfandi, Verawati Rasyid yang selalu memberikan Penulis semangat dan senantiasa membantu;

13. Sahabat Penulis Andi Irfan Wahyudi Mus, Azizah Zulfiah, Musdalipa, Galuh Nurfadillah Yahya, Mega Fia Lestari serta anak D'icon lainnya yang selalu membantu dan memberikan semangat kepada Penulis;

14. Teman-teman Legitimasi angkatan 2010;

15. Teman-teman Alumni angkatan 2010 SMA Negeri 1 Maros;

16. Teman-teman KKN Regular UNHAS Angkatan 85, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman khususnya desa Bakka-Bakka, Kak ciko, Kak Winda, Dian, Enno, Sinta, Ainin dan Kak Mail;

17. Para responden yang telah bersedia membantu Penulis, Fitra Ramadhan, Irwansyah, Wawan, Imam Gazali, Sufardi Hasbullah, Syahwan Marasabesy, Muh.Fikri, Andi Hasriadi, Andi Ishak, Fatma P, Rahmawati, Ilham, Nur Intang, Syarifuddin Latif, Ishak, Andi Awal Nur, Najidul Haq, Muh.Yusuf, Ali Akbar, Ilham Rizki;

18. Teman geng's, Jilo Kasma, Linda, Dewi, Icha, Ulfi, Aulia;

19. Teman-teman lain yang senantiasa memberikan masukan bagi Penulis dan senantiasa memberikan pendapat mengenai kasus yang sedang saya teliti ini. Terima kasih atas sarannya; dan
20. Seluruh pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Sebagai manusia biasa, Penulis menyadari bahwa Penulis takkan pernah luput dari khilaf dan salah. Begitupun dengan karya tulis ini, masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, Penulis mengharapkan saran dan kritikan yang positif dari berbagai pihak demi kesempurnaan karya tulis ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga ALLAH SWT senantiasa menyertai kita semua. Dan semoga semua yang telah kita kerjakan dengan niat baik mendapatkan berkah, *Aamiin*.

Makassar, 13 Februari 2014

Penulis,

ANDI NURFADILA RUKMA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	xi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 9
A. Ganti Rugi Korban Kejahatan.....	9
1. Pengertian Ganti Rugi	9
2. Pengertian Korban Kejahatan.....	11
B. Perlindungan Hukum Dalam Hal Ganti Rugi Dalam Beberapa Peraturan Perundang-undangan	15
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 14c	15
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 98 ..	16
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban	19
C. Tindak Pidana Penganiayaan	23
1. Jenis-Jenis Penganiayaan	23
	xi

2. Unsur –Unsur Penganiayaan	28
D. Pemulihan Kerugian Korban Melalui Jalur Non Litigasi	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Lokasi Penelitian	34
B. Teknik Pengumpulan Data	34
C. Jenis dan Sumber Data	35
D. Teknik Analisis Data	35
BAB IV PEMBAHASAN	38
A. Cara Korban Mengupayakan Ganti Rugi atas Tindak Penganiayaan yang Dialaminya	38
B. Kendala yang Dihadapi dalam Mengupayakan Ganti Rugi bagi Korban Tindak Pidana Penganiayaan	46
BAB V PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana termasuk pada ranah hukum publik. Di Indonesia, hukum pidana diatur secara umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan peninggalan dari zaman penjajahan Belanda, sebelumnya bernama *Wetboek van Strafrecht (WvS)*. KUHP merupakan *lex generalis* bagi pengaturan hukum pidana di Indonesia dimana asas-asas umum termuat dan menjadi dasar bagi semua ketentuan pidana yang diatur di luar KUHP.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional mengamanatkan asas setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Hal ini tidak terbukti dengan adanya ketidakseimbangan antara perlindungan korban kejahatan dengan pelaku kejahatan karena masih sedikitnya hak-hak korban kejahatan yang diatur dalam perundangan-undangan nasional. Perlindungan korban kejahatan dalam sistem hukum nasional nampaknya belum memperoleh perhatian serius.

Setiap negara mempunyai kewajiban untuk memberikan pemulihan dalam hal terjadi suatu tindak pidana terhadap kewajiban dibawah hukum untuk menghormati dan memastikan penghormatan terhadap hak-hak

asasi manusia, termasuk kewajiban untuk mencegah tindak pidana, kewajiban untuk menyelidiki tindak pidana, kewajiban untuk mengambil tindakan yang layak terhadap tindak pidana yang terjadi, dan kewajiban untuk memberikan penanganan hukum kepada para korban. Negara harus memastikan bahwa tidak ada orang yang mungkin bertanggung jawab atas tindak pidana yang akan mempunyai kekebalan dari tanggung jawab atas tindakan mereka.

Pemulihan yang dibebankan kepada pelaku mempunyai tujuan untuk meringankan penderitaan dan memberikan keadilan kepada para korban dengan menghilangkan atau memperbaiki sejauh mungkin akibat-akibat dari tindak pidana tersebut. Pemulihan seharusnya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan para korban. Pemulihan haruslah proporsional dengan beratnya pelanggaran dan kerusakan yang ditimbulkan dan haruslah mencakup: restitusi, kompensasi, rehabilitasi dan jaminan untuk tidak terulang lagi. Pemulihan untuk pelanggaran berat tindak pidana tertentu yang menjadi kejahatan dibawah hukum Indonesia mencakup suatu kewajiban untuk menuntut dan menghukum para pelaku.

Dalam perkara tindak pidana korban kejahatan sebenarnya merupakan pihak yang paling menderita. Namun selama ini, dalam penyelesaian perkara pidana banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Dalam hukum pidana di Indonesia selama ini korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti

yang memberi keterangan yaitu saksi sehingga kemungkinan untuk korban memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya kecil. Dalam penyelesaian perkara pidana, sering kali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa, sedangkan hak-hak korban diabaikan, sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah (Dikdik Arief, 2007: 25)

Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memerhatikan pula hak-hak para korban.

Perlindungan hukum terhadap korban selama ini didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai sumber hukum materiil, dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum acaranya. Bila diperhatikan, di dalam KUHP lebih banyak diatur mengenai tersangka dari pada mengenai korban. Kedudukan korban dalam KUHP tampaknya belum optimal dibandingkan dengan kedudukan pelaku tindak pidana. Hal ini dapat dijelaskan dalam penjelasan sebagai berikut: (Angkasa, 2004 : 169-172)

- 1) KUHP belum secara tegas merumuskan ketentuan yang secara konkrit atau langsung memberikan perlindungan hukum terhadap korban, misalnya dalam hal penjatuhan pidana wajib dipertimbangkan pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. KUHP juga tidak merumuskan tindak pidana restitusi (ganti rugi) yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi korban dan/atau keluarga korban. Rumusan pasal-pasal dalam KUHP cenderung berkuat pada rumusan tindak pidana, pertanggungjawaban dan ancaman pidana. Hal ini tidak terlepas pula dari doktrin hukum pidana yang melatarbelakanginya sebagaimana dikatakan oleh Herbert Packer dan Muladi bahwa masalah hukum pidana meliputi perbuatan yang dilarang atau

kejahatan dan mempunyai aspek kesalahan (*guilt*), serta ancaman pidana (*punishment*).

- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menganut aliran neo klasik yang antara lain menerima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan bagi pelaku tindak pidana yang menyangkut fisik, lingkungan, serta mental. Demikian pula dimungkinkannya aspek-aspek yang meringankan pidana bagi pelaku tindak pidana dengan pertanggungjawaban sebagian, di dalam hal-hal yang khusus, misalnya jiwanya cacat (gila), di bawah umur dan sebagainya. Jika kita melihat penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan KUHP terfokus terhadap pelaku dan pembahasan terhadap korban cenderung dilupakan. Idealnya, KUHP juga perlu lebih memperhatikan korban sebagai salah satu aspek yang sangat dirugikan akibat penderitaan karena perbuatan pelaku.

Perlindungan hukum bagi korban seharusnya diatur secara eksplisit dalam KUHP. Misalnya dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku, perlu juga mempertimbangkan kerugian yang diderita oleh korban atau keluarga korban. Sehingga pelaku bisa saja diberikan pidana ganti rugi yang mungkin akan lebih bermanfaat bagi korban (Rena Yulia, 2010 : 181). Mengenai ganti kerugian yang dialami korban kejahatan atau korban suatu tindak pidana, diberbagai negara telah lama mendapat perhatian, di Amerika Serikat (USA) misalnya, dengan pembayaran ganti kerugian terhadap korban, maka perkaranya telah dianggap selesai dan tidak dituntut lagi (Leden Marpaung, 1997 : 81)

Negara Amerika Serikat membuat lembaga khusus untuk menangani pemberian kompensasi bagi korban kejahatan. *The Crime Victim's Compensation Board*, lembaga ini dibentuk untuk menangani pemberian bantuan penggantian biaya pengobatan, pemakaman,

kehilangan penghasilan, dan sebagainya. Dengan adanya lembaga *The Crime Victim's Compensation Board* tentu sangat bermanfaat untuk membantu korban kejahatan yang menderita kerugian secara finansial, khususnya apabila pelaku kejahatan tidak mampu membayar ganti kerugian kepada korban kejahatan sebagai akibat menderitanya korban akibat suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku. Lembaga ini memberikan bantuan kepada korban kejahatan dengan cara yang mudah dan cepat sebagai wujud kepedulian negara kepada warganya. Tentu lain dengan Indonesia, dalam kasus banyak korban enggan untuk berurusan dengan hukum apalagi meminta ganti rugi, karena nantinya hasil yang didapat tidak seimbang dengan biaya yang telah dikeluarkan (di akses pada tanggal 25/10/13 http://wartaaceh.com/memahami-perlindungan-terhadap-korban-kejahatan/#chitika_close_button)

Di Indonesia sendiri, masalah ganti kerugian bagi korban dalam lapangan hukum pidana salah satunya diatur dalam Pasal 98 Ayat (1) KUHAP:

Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menerapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

Sedangkan dalam Ayat (2) nya diatur mengenai batasan waktu yaitu:

Permintaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan

tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Secara umum penyebab terjadinya penganiayaan adalah pertama berasal dari dalam diri pelaku dimana bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan penganiayaan itu timbul dari dalam diri pelaku yang di dasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan, faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku. Maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah penganiayaan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan, selain itu dengan kehidupan masyarakat kota yang modernisasi menimbulkan sisi negatif dimana timbul kesenjangan sosial diantara masyarakat yang satu dan lainnya.

Dari uraian di atas sebenarnya harus diakui bahwa penganiayaan dari tahun ke tahun meningkat seiring dengan perkembangan dengan kehidupan masyarakat yang dapat menumbuhkan keyakinan bahwa masyarakat modern yang sangat kompleks dapat menumbuhkan aspirasi-aspirasi materiil yang tinggi dan sering disertai emosi-emosi sosial yang tidak sehat. Kebutuhan akan pemenuhan materiil tanpa mempunyai kemampuan untuk mencapainya dengan wajar mendorong terjadinya tindakan kejahatan, dengan kata lain apabila harapan tidak sesuai dengan kenyataan akan menimbulkan masalah atau penganiayaan.

Dalam pembahasan ini, yang menjadi pelaku penganiayaan tidak hanya dikenakan sanksi pidana, tetapi juga memberikan ganti kerugian kepada korban. Hal ini jelas tertera dalam Bab XIII KUHAP tentang Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian, secara khusus dalam Pasal 98.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut yang berjudul **“Ganti Rugi Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Polres Maros.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas maka masalah penelitian yang penulis dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah korban mengupayakan ganti rugi atas tindak penganiayaan yang dialaminya ?
2. Kendala-kendala apakah yang dihadapi dalam pengupayaan ganti rugi bagi korban penganiayaan ?

C. Tujuan

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, ada beberapa tujuan yang melandasi penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan korban terhadap ganti rugi atas tindak pidana penganiayaan yang dialaminya.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pengupayaan ganti rugi bagi korban penganiayaan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk penelitian sejenis secara mendalam.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintahan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam mengambil kebijakan publik terutama berkaitan dengan masalah kejahatan pada umumnya, khususnya dalam memahami proses Restitusi bagi korban kejahatan di Kota Maros.
- b. Bagi pribadi Penulis, penelitian ini merupakan langkah awal dalam penyusunan skripsi sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ganti Rugi Korban Kejahatan

1. Pengertian Ganti Rugi

Istilah ganti rugi dipakai dalam hukum perdata yang timbul sebagai akibat dari “wanprestasi” dan “perbuatan melanggar hukum”. Wanprestasi berarti tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban yang sebagaimana mestinya telah di perjanjikan dalam hukum perikatan maupun karena undang-undang. Ganti kerugian akibat perbuatan melanggar hukum diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.

Terhadap ganti kerugian ini, Subekti menjelaskan antarl lain:
(Leden Marpaung, 1997 : 4)

Ganti rugi sering diperinci dalam tiga unsur: biaya, rugi, dan bunga (dari bahasa Belanda “*kosten, schaden en interessen*”). Yang dimaksud dengan biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak.

Yang dimaksud dengan istilah rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan yang diakibatkan karena kelalaian debitur.

Yang dimaksud dengan bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan (bahasa Belanda *winstderving*).

Dalam pasal 98 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) bentuk ganti rugi terhadap korban dapat dilakukan melalui penggabungan perkara sebagaimana disebutkan “jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu tetap menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu”.

Dasar hukum penggabungan perkara ganti rugi tindak pidana terdapat dalam Pasal 98 sampai Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Selain melalui penggabungan perkara, ganti kerugian juga dapat melalui perkara perdata setelah adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dilihat dari kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat yaitu pertama, untuk memenuhi kerugian material dan segala biaya yang telah dikeluarkan, dan kedua merupakan pemuasan emosional korban. Sedangkan dilihat dari sisi kepentingan pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai sesuatu yang konkrit dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang patut diperbuat.

Geleway (Rena Yulia, 2010 : 59) merumuskan lima tujuan dari kewajiban mengganti kerugian, yaitu:

- a. Meringankan penderitaan korban.
- b. Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan.
- c. Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana.
- d. Mempermudah proses peradilan.

2. Korban Kejahatan

Secara etologis korban adalah orang yang mengalami kerugian baik kerugian fisik maupun kerugian mental dan kerugian finansial yang merupakan akibat dari suatu tindak pidana (sebagai akibat) atau merupakan salah satu faktor timbulnya tindak pidana (sebagai sebab) .

Korban diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat tindak pidana dan rasa keadilannya secara langsung terganggu akibat dari pengalamannya menjadi target/sasaran tindak pidana.

Menurut kamus *Crime Dictionary* yang dikutip seorang ahli bahwa Victim adalah “*person who has injured mental or physical suffering, loss of property death resulting from an actual or attempted criminal offense committed by another*” yaitu orang yang telah mendapat penderitaan fisik ataupun penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati

atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya". Disini jelas yang dimaksud "orang yangmendapat penderitaan fisik dan seterusnya" itu adalahkorban dari pelanggaran atau tindakpidana.

Konsepsi korban tindak pidana juga terumuskan dalam *Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, yaitu:

1. Korban tindak pidana (*Victim of Crime*) meliputi

a. Korban langsung (*Direct Victims*)

Yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana dengan karakteristik sebagai berikut:

- ✓ Korban adalah orang secara individu atau secara kolektif.
- ✓ Menderita kerugian meliputi: luka fisik, lika mental, penderitaan emosional, kehilangan dan penindasan hak-hak dasar manusia.
- ✓ Disebabkan adanya perbuatan atau kelalaian yang terumuskan dalam hukum pidana.
- ✓ Atau disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan.

b. Korban tidak langsung (*Indirect Victims*)

Yaitu timbulnya korban akibat dari turut campurnya seseorang dalam membantu korban langsung (*direct victims*)

atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban, tetapi dia sendiri menjadi korban tindak pidana atau mereka menggantungkan hidupnya kepada korban langsung, seperti isteri/suami, anak-anak dan keluarga terdekat.

2. *Victims of abuse of power*

Korban adalah orang yang secara individual atau kolektif menderita kerugian, termasuk luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kehilangan ekonomi atau pelanggaran terhadap pokok-pokok hak dasar mereka melalui perbuatan-perbuatan atau kelalaian yang belum merupakan pelanggaran undang-undang pidana nasional tetapi norma-norma diakui secara internasional yang berhubungan dengan hak-hak asasi manusia (Bambang Djoyo Supeno, 1997 : 14) (diakses pada tanggal 26/10/13 <http://yuyantilalata.blogspot.com/2010/10/korban-victim.html>)

Menurut Arif Gosita (Siswanto Sunarso, 2012 : 31) yang dimaksud dengan korban adalah:

Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari kepentingan pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.

Korban juga didefinisikan oleh Van Boven yang merujuk pada deklarasi prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban kejahatan dan

penyalahgunaan kekuasaan sebagai berikut : (Rena Yulia, 2010 : 49-50)

yang di maksud dengan korban adalah :

Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan (*by act*) maupun kelalaian (*by omission*).

Secara yuridis pengertian korban terdapat dalam beberapa undang-undang sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Melihat pengertian tersebut unsur-unsur korban dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Setiap orang,
2. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau
3. Kerugian ekonomi,
4. Akibat tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, korban adalah orang perseorangan atau kelompok yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban atau ahli warisnya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran HAM yang Berat, korban adalah orang perseorangan atau kelompok yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan pihak manapun.

Dari beberapa definisi, korban bukan saja perorangan, yang dimaksud perorangan ialah korban yang hanya terdiri dari satu orang saja, misalnya pembunuhan, penganiayaan, perkosaan, pencurian dan sebagainya. Pada tahap perkembangannya, korban kejahatan meluas dan kompleks. Misalnya, suatu badan, organisasi, atau lembaga.

B. Perlindungan Hukum Dalam Hal Ganti Rugi Dalam Beberapa Peraturan Perundang-undangan.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 14c

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana penerapan ganti rugi terdapat dalam pasal 14c, yang berbunyi:

Apabila hakim menjatuhkan pidana percobaan kecuali jika dijatuhi pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi.

Dalam hal ini, hakim memiliki kewenangan untuk mencantumkan syarat khusus berupa ganti rugi bersama hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Apabila hakim telah bermaksud untuk menjatuhkan suatu pidana denda bagi seorang terdakwa yang sedang ia adili, hakim dapat menetapkan syarat khusus yang mengatakan bahwa terpidana harus mengganti kerugian yang telah timbul sebagai akibat dalam perbuatannya yang bersifat melanggar hukum, baik seluruhnya maupun sebagian dari kerugian yang telah ditetapkan di dalam perintah penangguhan pelaksanaan pidana, dalam suatu jangka waktu yang tertentu, tetapi yang harus lebih singkat dari lamanya masa percobaan itu sendiri (Lamintang, 2012 : 138-139).

2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 98

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan juga diatur melalui proses penggabungan perkara yang terdapat dalam KUHPA Pasal 98 sampai dengan Pasal 101.

Pasal 98 ayat (1) KUHPA berbunyi “jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu tetap menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu”. Sedangkan dalam ayat (2) berbunyi “permintaan sebagaimana yang

dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan”.

Dengan adanya ketentuan seperti yang diatur dalam Pasal 98 ayat (1) KUHAP penggugat yang merasa dirugikan oleh perbuatan terdakwa akan memperoleh keuntungan berupa dipersingkatnya waktu untuk mendapatkan putusan hakim bagi gugatan ganti ruginya. Akan tetapi, di lain pihak penggabungan gugatan untuk mendapatkan ganti rugi pada suatu perkara pidana akan membuat proses pemeriksaan dari perkara pidananya sendiri menjadi terpaksa dilakukan lebih lama atau menjadi tidak dapat segera diakhiri dengan putusan hakim mengenai salah atau tidaknya terdakwa, kecuali:

- ✓ Apabila pemeriksaan mengenai gugatan ganti rugi itu dilakukan setelah pengadilan memberikan putusannya mengenai perkara pidana tersebut;
- ✓ Apabila pengadilan yakin bahwa terdakwa memang benar-benar terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh penuntut umum dan tidak ada satupun dasar hukum yang membuat pengadilan menjadi tidak dapat menjatuhkan pidana bagi terdakwa (Lamintang, 2010 : 253-254)

Menurut Soesilo, pasal ini menentukan bahwa jikalau perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dalam suatu tuntutan perkara yang diajukan oleh penuntut umum di pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang ini dapat mengajukan permintaan ganti kerugian dan hakim ketua sidang dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian itu kepada perkara pedananya. Disini terang bahwa suatu perkara perdata dapat diperiksa bersama-sama dengan perkara pidana dalam suatu sidang pengadilan negeri. Permintaan ganti kerugian itu tidak dapat diajukan pada sembarang waktu. Menurut Ayat (2) pasal ini maka permintaan tersebut harus diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum dalam sidang pengadilan mengajukan tuntutan pidana. Apabila penuntut umum tidak hadir seperti dalam acara pemeriksaan cepat, maka permintaan harus diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Mengenai kewenangan mengadili dan besarnya ganti rugi diatur dalam Pasal 99 Ayat (1) KUHP bahwa :

Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.

Tentunya pengadilan tidak berwenang untuk mengadili maka korban dapat menambahkan permohonan penetapan hakim dalam pengajuan penggabungan perkara itu sejak awal, sesuai Pasal 99 Ayat (2)

bahwa: Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Dengan demikian walaupun diluar kewenangan hakim yang mengadili, maka penetapan hakim ini mempunyai kekuatan hukum pasti sesuai Pasal 99 Ayat (3) KUHAP, yaitu Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap (di akses pada tanggal 30/10/13 melalui situs <http://jurnal.fhunla.ac.id/index.php/WP/article/download/16/2>).

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Dalam Pasal 5 dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, seorang saksi dan korban berhak:

- ✓ Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- ✓ Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;

- ✓ Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- ✓ Mendapat penerjemah;
- ✓ Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- ✓ Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- ✓ Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
- ✓ Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- ✓ Mendapat identitas baru;
- ✓ Mendapatkan tempat kediaman baru;
- ✓ Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- ✓ Mendapat nasihat hukum; dan/atau
- ✓ Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Sedangkan dalam Pasal 7 yaitu :

- (1) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:
- a. Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;

- b. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana
- (2) Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan mengenai kompensasi dan restitusi kepada korban terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, dalam pasal:

Pasal 20

- (1) Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi.
- (2) Permohonan untuk memperoleh restitusi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus.
- (3) Permohonan untuk memperoleh restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK.

Pasal 21

Pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Artinya, korban dapat melakukan permintaan penggabungan perkara sebagaimana diatur dalam KUHP melalui LPSK.

Pasal 22

- (1) Permohonan restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Identitas pemohon;
 - b. Uraian tentang tindak pidana;
 - c. Identitas pelaku tindak pidana;
 - d. Uraian kerugian yang nyata-nyata diderita; dan
 - e. Bentuk restitusi yang diminta.
- (2) Permohonan restitusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri:
 - a. Fotokopi identitas korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh korban atau keluarga yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 - c. Bukti biaya yang dikeluarkan selama perawatan dan/atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan;
 - d. Fotokopi surat kematian dalam hal korban meninggal dunia;
 - e. Surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjukkan pemohon sebagai korban tindak pidana;
 - f. Surat keterangan hubungan keluarga, apabila pemohon diajukan oleh keluarga; dan
 - g. Surat kuasa khusus, apabila permohonan restitusi diajukan oleh kuasa korban atau kuasa keluarga.
- (3) Apabila permohonan restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) perkaranya telah diputus pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka permohonan restitusi harus dilampiri putusan pengadilan tersebut.

C. Tindak Pidana Penganiayaan

1. Jenis-Jenis Penganiayaan

Pengertian penganiayaan tidak secara rinci dijelaskan dalam KUHP. Menurut ilmu pengetahuan (doktrine) penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Tindak pidana penganiayaan diatur dalam dalam Bab XX Buku ke-II KUHP.

Adapun jenis-jenis tindak pidana penganiayaan yaitu:

a. Tindak Pidana Penganiayaan Biasa

Penganiayaan biasa dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351, adapun rumusannya yaitu:

- ✓ Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- ✓ Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
- ✓ Penganiayaan yang menyebabkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- ✓ Penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.

- ✓ Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.

Unsur- unsur penganiayaan biasa, yakni:

- a. Adanya kesengajaan.
 - b. Adanya perbuatan.
 - c. Adanya akibat perbuatan yang dituju, rasa sakit pada tubuh, dan/atau luka pada tubuh.
 - d. Mengakibatkan kematian.
- b. Tindak Pidana Penganiayaan Ringan

Hal ini diatur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut pasal ini, penganiayaan ada dan diancam dengan pidana penjara paling lama lima bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan 356, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan.

Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana. Adapun unsur-unsur penganiayaan ringan, yaitu:

- a. Diluar hal-hal tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356.
- b. Penganiayaan tidak menimbulkan rasa sakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatan.

- c. Dihukum sebagai penganiayaan ringan.
- d. Bukan penganiayaan yang dilakukan;
 - 1) Terhadap bapak atau ibu yang sah, istri atau anaknya.
 - 2) Terhadap pegawai negeri yang sedang dan/atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
 - 3) Dengan memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan dan diminum.
- e. Percobaan tindak pidana ini tidak dapat dipidana.

c. Tindak Pidana Penganiayaan Berencana

Menurut Pasal 353 KUHP ada 3 macam penganiayaan berencana, yaitu:

- ✓ Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- ✓ Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman selama-lamanya tujuh tahun.
- ✓ Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman selama-lamanya sembilan tahun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 353, maka unsur-unsur penganiayaan berat, yaitu:

1. Dengan direncanakan terlebih dahulu;
2. Mengakibatkan luka berat;
3. Mengakibatkan kematian.

Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat:

1. Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang.
2. Sejak timbulnya kehendak/pengambilan keputusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup sehingga dapat digunakan olehnya untuk berfikir, antara lain:
 - Resiko apa yang akan ditanggung.
 - Bagaimana cara dan dengan alat apa serta saat yang tepat untuk melaksanakannya.
 - Bagaimana cara menghilangkan jejak.
3. Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dengan hati yang tenang.

d. Tindak Pidana Penganiayaan Berat

Tindak pidana berat diatur dalam Pasal 354 KUHP.

- ✓ Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- ✓ Jika perbuatan itu menyebabkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana paling lama sepuluh tahun.

Jika dilihat Pasal 354 KUHP, maka dapat diketahui unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1) Unsur subjektif, yaitu adanya kesengajaan.
- 2) Unsur objektif, yaitu menyebabkan luka berat dan matinya orang lain.

Istilah luka berat dalam Pasal 90 KUHP, yaitu:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut.
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
3. Kehilangan salah satu panca indera.
4. Mendapat cacat berat.
5. Menderita sakit lumpuh.
6. Terganggunya daya fikir selama empat minggu lebih.

7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

e. Tindak Pidana Penganiayaan Berat Berencana

Tindak pidana berat dengan direncanakan lebih dahulu tercantum dalam Pasal 355 KUHP, yang dirumuskan sebagai berikut:

- ✓ Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- ✓ Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana paling lama lima belas tahun.

Dari rumusan diatas, adapun unsur-unsur tindak pidana penganiayaan berencana, yaitu:

- Penganiayaan berat.
- Direncanakan terlebih dahulu.

2. Unsur –Unsur Penganiayaan

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut penganiayaan, mengenai arti dan makna penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya.

Dalam doktrin atau ilmu hukum pidana, berdasarkan sejarah pembentukan dari Pasal 351 diatas, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.

Menurut doktrin penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya kesengajaan
- 2) Adanya perbuatan
- 3) Adanya akibat perbuatan yang dituju, yakni rasa sakit pada tubuh dan luka pada tubuh

Unsur yang pertama adalah unsur subjektif sedangkan unsur kedua dan ketiga adalah unsur objektif. Pengertian yang dijelaskan diataslah yang banyak dianut oleh praktek hukum selama ini.

D. Pemulihan Kerugian Korban Melalui Jalur Non Litigasi

Pemulihan kerugian korban melalui jalur non litigasi disini yang dimaksud yaitu mediasi, negosiasi, fasilitasi dan arbitrase. Dalam ketentuan perundang-undangan tidak ditemukan rumusan mengenai prosedur mediasi, tetapi prosedur mediasi tersirat dalam ketentuan mengenai penyelesaian sengketa diluar pengadilan diantaranya ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Mediasi secara etimologi, berasal dari bahasa Latin, yaitu: “*mediare*” yang berarti “berada ditengah”. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “Berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menimbulkan kepercayaan (*trust*) dari pihak yang bersengketa (Rachmadi Usman, 2012 : 23)

J. Folberg dan A. Taylor lebih menekankan konsep mediasi pada upaya yang dilakukan mediator dalam menjalankan kegiatan mediasi. Kedua ahli ini menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dilakukan secara bersama-sama oleh pihak yang bersengketa dan dibantu oleh pihak yang netral. Sedangkan Garry Goopaster memberikan definisi mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan (Syahrizal Abbas, 2009 : 5)

Pengertian mediasi yang lebih konkret dapat ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 1 butir (6) yaitu, mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dibantu oleh mediator.

Dalam mediasi penyelesaian sengketa atau perselisihan banyak muncul dari keinginan para pihak sehingga muncul mediator berperan membantu mereka mencapai kesepakatan-kesepakatan.

Negosiasi merupakan penyelesaian sengketa tanpa adanya pihak ketiga. Para pihak setuju untuk menyelesaikan persoalan melalui proses musyawarah, perundingan dimana para pihak terlibat langsung dalam dialog dan prosesnya.

Fasilitasi merupakan suatu keterampilan dalam proses penyelesaian sengketa, dimana fasilitator berusaha melakukan komunikasi dengan pihak yang bersengketa atau pihak yang berbeda pandangan dalam upaya membangun dialog untuk menjembatani perbedaan mereka. Tujuan utama fasilitator adalah untuk mewujudkan kesepakatan bersama diantara para pihak yang berkonflik, sehingga mendorong mereka untuk mencapai kesepakatan (Syahrizal Abbas, 2009 : 12)

Arbitrase atau lebih dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution(ADR)* merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Dasar hukum ADR diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dimana pengertian alternatif penyelesaian sengketa terdapat dalam pasal 1 angka 10 yaitu lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian

diluar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Dibandingkan penyelesaian melalui jalur litigasi, penyelesaian sengketa melalui jalur ADR mempunyai keunggulan-keunggulan sebagai berikut:(Rachmadi Usman, 2012 : 12)

- a. Adanya sifat kesukarelaan dalam proses, dimana para pihak percaya bahwa dengan menyelesaikan penyelesaian sengketa melalui ADR akan mendapatkan penyelesaian sengketa yang lebih baik dibandingkan sistem litigasi karena dalam proses ADR tidak ada unsur pemaksaan;
- b. Prosedur yang cepat;
- c. Keputusannya bersifat non judicial karena kewenangan untuk membuat keputusan ada pada pihak-pihak yang bersengketa;
- d. Hemat waktu dan biaya;
- e. Tingginya kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan karena keputusan yang diambil adalah keputusan yang berdasarkan pada kesepakatan para pihak;
- f. Pemeliharaan hubungan kerja

Sebenarnya penyelesaian sengketa melalui mekanisme mediasi sudah menjadi budaya bagi kita. Dalam Masyarakat Adat Dayak-Kalimantan Tengah, berdasarkan Perda Kotawaringin Timur Nomor 15/2001 tentang Kedamaian dan Perda Pulang Pisau Nomor 11/2003

tentang Pembentukan Kelembagaan dan Pemberdayaan Adat Dayak. Dalam masyarakat Adat Aceh ada empat pola penyelesaian konflik dalam tradisi masyarakat *gampong* di Aceh yaitu *di'iet*, *sayam*, *suloeh* dan *peumat jaroe*. Pola ini merupakan pola penyelesaian konflik yang menggunakan kerangka adat dan syariat. Dalam proses penegakan hukum kasus tindak pidana apalagi nilai kerugian sangat kecil menjadi sorotan media massa dan masyarakat, terkesan terlalu kakunya proses penegakan hukum dalam proses peradilan pidana.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini nantinya, penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Maros, Polres Maros dan Polsek yang berada di wilayah Maros, Kejaksaan Negeri Maros hal ini menjadi pertimbangan karena lokasi tersebut strategis mudah untuk mendapatkan informasi mengenai korban penganiayaan dalam hal pemberian ganti rugi, sehingga penulis berharap akan mudah memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis ajukan.

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan Penulis untuk memperoleh data dan informasi dalam penulisan skripsi ini nantinya yaitu:

- a) *Field Research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan Penulis melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten (polisi dan korban penganiayaan) dan melalui kuesioner kepada masyarakat (korban penganiayaan). Data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen, dan arsip-arsip yang diberikan oleh Pihak Kepolisian dan Pengadilan.

- b) Library Research (penelitian kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder lainnya, yakni dengan membaca dan menelaah berbagai bahan pustaka dan mempelajari berkas perkara yang ada hubungannya dengan objek yang akan dikaji.

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan sebagai dasar untuk menunjang hasil penelitian adalah:

- a) Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten (polisi dan koban penganiayaan) dan melalui kuesioner kepada masyarakat (korban penganiayaan)
- b) Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan seperti dokumen termasuk pula literatur bacaan lainnya, peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya serta melalui media massa yang berkorelasi langsung dengan pembahasan penelitian ini.

D. Teknik Analisis Data

Semua data yang diperoleh disusun dan dianalisa secara kualitatif selanjutnya disajikan secara deskriptif. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang dapat diperbaharui secara jelas dan terarah

yang berkaitan dengan Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dalam hal pemberian restitusi .

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Cara Korban Mengupayakan Ganti Rugi atas Tindak Pidana Penganiayaan yang Dialaminya.

Kejahatan merupakan tindakan kriminal yang tidak dapat di toleransi lagi, melihat realita yang terjadi di masyarakat khususnya di Kabupaten Maros seringnya terjadi kejahatan tentunya memberikan kerugian terhadap korban kejahatan secara mental fisik maupun materiil.

Tabel 1
Jumlah kejahatan yang terjadi di Kota Maros 2010-2013

No	Jenis kejahatan	2010	2011	2012	2013	Jumlah kejahatan
1.	Penghinaan	11	10	3	13	37
2.	Penggelapan	41	32	30	105	208
3.	Pencurian	314	265	202	348	1129
4.	Penganiayaan	173	158	124	159	614
5.	Kejahatan Terhadap Nyawa	1	3	2	4	10
6.	Menghancurkan atau Merusak Barang	21	25	20	26	92
7.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	22	24	17	27	90
8.	Perbuatan Tidak Menyenangkan	30	13	15	30	88
9.	Penipuan	52	26	22	36	136
10.	Pengancaman	26	27	17	23	93
Jumlah						2497

Sumber data diperoleh dari Polres Maros

Pada gambar tabel di atas dapat dilihat bahwa penganiayaan merupakan kejahatan kedua tertinggi dengan jumlah kasus dari tahun 2010-2013 yaitu 614, sedangkan yang tertinggi yaitu pencurian dengan jumlah kasus dari tahun 2010-2013 adalah 1129. Adapun presentase kasus penganiayaan terdapat pada tabel 2.

Tabel 2
Jumlah Kasus Penganiayaan 2010-2013

No	Tahun	Jumlah Penganiayaan	Presentase
1.	2010	173	28.1%
2.	2011	158	25.7%
3.	2012	124	20.4%
4.	2013	159	25.8%
Jumlah :		614	100%

Sumber data diperoleh dari Polres Maros

Dalam hukum pidana materiil, pengaturan tentang ganti kerugian memang masih sangat minim kita temukan, yaitu hanya terdapat dalam Pasal 14c ayat (1) KUHP yang mengatur : “Dengan perintah yang dimaksud dalam pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi”. Pengaturan tentang ganti kerugian ini justru lebih banyak diatur dalam hukum pidana formil, dapat dilihat dalam Pasal 95 dan Pasal 96 KUHP dan Pasal 98 sampai Pasal 101 KUHP.

Menyangkut upaya yang dapat dilakukan oleh korban Penganiayaan yang ingin mendapatkan ganti rugi, dapat dilakukan dengan jalur litigasi dan non litigasi. Jalur litigasi dapat dilakukan korban apabila ditemukan jalan buntu sampai ke tahap pemeriksaan di pihak Kepolisian, maka korban dapat meminta agar kasusnya dilanjutkan ke Pengadilan. Ganti Rugi untuk korban penganiayaan pada dasarnya dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu; melalui Penggabungan Perkara Ganti Kerugian, melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dan melalui Permohonan Restitusi. Dalam proses di pengadilan, korban dapat mengajukan Permohonan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian kepada majelis hakim, agar proses pidananya dijalankan bersamaan dengan proses perdatanya. Untuk penggabungan perkara ganti kerugian sendiri diatur dalam Bab XIII UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHP") yang mengatur dari Pasal 98 hingga Pasal 101. Pasal 98 ayat (1) KUHP menentukan bahwa, "Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu." Untuk itu permohonan penggabungan perkara ganti kerugian berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) UU KUHP diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan

tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Mekanisme lain yang tersedia adalah menggunakan Gugatan Perdata biasa dengan model gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Dalam gugatan ini, Penggugat, dalam hal ini korban tindak pidana, tentu harus menunggu adanya putusan Pengadilan yang telah memutus perkara pidana yang dilakukan oleh Pelaku (Tergugat).

Sementara tersedia juga mekanisme lain yaitu mengajukan permohonan Restitusi yang diajukan berdasarkan ketentuan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ("UU 13/2006"), PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban ("PP 44/2008"), dan Peraturan LPSK No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi. Permohonan Restitusi diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b jo Pasal 7 ayat (2) UU 13/2006 yang kemudian secara lebih detail diatur dalam PP 44/2008.

Berdasarkan PP 44/2008, permohonan Restitusi ini dapat diajukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (vide Pasal 21 PP 44/2008). Permohonan Restitusi tersebut diajukan secara tertulis yang bermaterai cukup dalam bahasa Indonesia oleh Korban, Keluarganya atau Kuasanya kepada Pengadilan melalui LPSK.

Selain jalur litigasi, korban juga dapat mengupayakan ganti rugi melalui jalur non litigasi. Jalur non litigasi dapat dilakukan korban dengan cara meminta langsung ganti kerugian terhadap tersangka, atau dengan kata lain penyelesaian melalui jalan kekeluargaan. Cara penyelesaian lain menyangkut non litigasi yang dapat dilakukan korban ialah dengan memakai perantara pihak kepolisian sebagai penengah untuk melakukan mediasi apabila ditemukan hambatan-hambatan.

Dari beberapa jalur upaya ganti rugi yang tersedia tersebut, berdasarkan penelitian penulis di wilayah hukum Polres Maros, didapatkan data sebagai berikut :

Tabel 3
Upaya yang Ditempuh Korban untuk Memperoleh
Ganti Rugi tahun 2010-2013

Jalur penyelesaian	Jumlah	Presentase
Litigasi (Penggabungan Perkara)	0	0 %
Non Litigasi	20	100%
Total	20	100%

Sumber data diperoleh melalui kuesioner dan wawancara terhadap korban kejahatan.

Berdasarkan tabel diatas tampak jelas kita lihat bahwa sebagian besar koban kejahatan lebih memilih untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi dengan jalur non litigasi. Hal ini disebabkan karena jalur non litigasi lebih mudah dari pada harus berurusan sampai ke Pengadilan. Hal lain yang menyebabkan lebih banyak korban memilih jalur non litigasi

ialah ketidaktahuan masyarakat tentang adanya Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian.

Tabel 4

Data Ketidaktahuan Masyarakat Tentang Adanya Penggabungan Perkara Ganti Kerugian

No	Nama Korban	Tahu	Tidak Tahu
1.	Fitrah Ramadhan		✓
2.	Irwansyah		✓
3.	Wawan		✓
4.	Imam Gazali		✓
5.	Sufardi Hasbullah		✓
6.	Syahwan Marasabesy		✓
7.	Muh.Fikri		✓
8.	Andi Hasriadi		✓
9.	Andi Ishak		✓
10.	Fatma P		✓
11.	Rahmawati		✓
12.	Ilham		✓
13.	Nur Intang		✓
14.	Syarifuddin Latif		✓
15.	Ishak		✓
16.	Andi Awal Nur		✓
17.	Najidul Haq		✓
18.	Muh. Yusuf		✓
19.	Ali akbar		✓
20.	Ilham Rizki		✓

Sumber data diperoleh melalui kuesioner dan wawancara terhadap korban kejahatan.

Selain itu, berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara terhadap korban penganiayaan didapatkan juga fakta bahwa beberapa korban penganiayaan yang memilih jalur non litigasi ternyata tidak melaporkan kasusnya kepada pihak kepolisian dengan berbagai alasan.

Tabel 5
Model Penyelesaian Non Litigasi Ganti Rugi oleh Korban dan Pelaku Penganiayaan

Jalur penyelesaian	Jumlah	Presentase
Melaporkan ke Kepolisian	10	50 %
Tidak Melaporkan ke Kepolisian	10	50%
Total	20	100%

Sumber data diperoleh melalui kuesioner dan wawancara terhadap korban kejahatan.

Dari tabel diatas dapat kita lihat data yang menunjukkan bahwa 50% dari korban penganiayaan memilih untuk tidak melaporkan kasusnya ke kepolisian. Sedangkan 50% lainnya memilih untuk melaporkan kasusnya ke kepolisian. Ada banyak alasan yang mengakibatkan korban memilih untuk tidak melaporkan kasusnya ke kepolisian antara lain disebabkan oleh alasan ekonomi, sosiologi, keluarga, dan lainnya. Salah satu korban yang tidak melaporkan kasusnya ke kepolisian adalah Fitrah Ramadhan (22 tahun). Berikut penulis akan menguraikan secara singkat kejadian korban dtersebut.

Penganiayaan yang dialami oleh Fitrah Ramadhan terjadi sekitar bulan 10 tahun 2012 pada pukul 22.00 WITA yang dilakukan oleh 4 (empat) orang anggota TNI-AD . Semula pada pukul 21.30 WITA korban mengendarai motornya menuju ke toko Holland Bakery yang terdapat di

Jl.Jenderal Sudirman Maros dan dalam perjalanan, motor korban tidak sengaja menyenggol motor salah satu pelaku. Setelah korban keluar dari toko roti, ternyata pelaku dan teman-temannya telah menunggu korban di depan toko roti tersebut dan akhirnya memukul/mengeroyok korban lalu mereka pergi. Korban mengalami memar di bagian wajah.

Korban lalu menceritakan kejadian tersebut kepada temannya yang tidak lain merupakan senior dari para pelaku. Dan seniornya pun melaporkan kejadian tersebut kepada komandan mereka. Akhirnya dua hari kemudian para pelaku beserta komandannya mendatangi rumah korban di Perum Tumalia Blok B/108 untuk meminta maaf dan melakukan proses perdamaian. Dari hasil pembicaraan perdamaian tersebut, pelaku memberikan uang ganti rugi kepada korban sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) tetapi orang tua korban hanya menerima Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mengembalikan sisanya dengan alasan jumlah tersebut sudah cukup untuk biaya pemulihan luka korban.

Tabel 6
Jumlah Ganti Rugi yang Diterima oleh Korban Penganiayaan

NO.	Nama Korban	Model Penyelesaian		Mendapat kan Ganti Rugi (Ya/Tidak)	Jumlah Ganti Rugi yang Diterima Korban
		Lapor Polisi	TdkMela por Polisi		
1.	Fitrah Ramadhan		✓	Ya	Rp.1.500.000,00
2.	Irwansyah	✓		Ya	Rp.1.000.000,00
3.	Wawan	✓		Ya	Rp.200.000,00

4.	Imam Gazali	✓		Ya	Rp.300.000,00
5.	Sufardi Hasbullah	✓		Ya	Rp.500.000,00
6.	Syahwan Marasabesy	✓		Ya	Rp.1.000.000,00
7.	Muh.Fikri	✓		Ya	Rp.1.000.000,00
8.	Andi Hasriadi	✓		Ya	Rp.500.000,00
9.	Andi Ishak	✓		Ya	Rp.1.000.000,00
10.	Fatma P	✓		Ya	Rp.500.000,00
11.	Rahmawati		✓	Ya	Rp.1.000.000,00
12.	Ilham		✓	Ya	Rp.500.000,00
13.	Nur Intang	✓		Ya	Rp.100.000,00
14.	Syarifuddin Latif		✓	Ya	Rp.2.000.000,00
15.	Ishak		✓	Ya	Rp.750.000,00
16.	Andi Awal Nur		✓	Ya	Rp.200.000,00
17.	Najidul Haq		✓	Ya	Rp.1.000.000,00
18.	Muh. Yusuf		✓	Ya	Rp.750.000,00
19.	Ali akbar		✓	Ya	Rp.1.000.000,00
20.	Ilham Rizki		✓	Ya	Rp.500.000,00

Sumber data diperoleh melalui kuesioner dan wawancara terhadap korban kejahatan.

Dari paparan data dalam tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah ganti rugi yang diterima oleh korban penganiayaan melalui jalur non litigasi ini berbeda-beda. Perbedaan jumlah ganti rugi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti jumlah kerugian materiil, luka yang diderita

korban, hingga strata sosial korban atau keluarga korban yang kemudian diputuskan melalui pembicaraan diantara kedua belah pihak.

B. Kendala yang Dihadapi dalam Mengupayakan Ganti Rugi bagi Korban Tindak Pidana Penganiayaan

Setiap upaya yang dilakukan, tidak lepas dari kendala-kendala yang sering ditemui. Begitupun halnya untuk mendapatkan ganti kerugian tidaklah mudah karena harus melewati proses yang panjang. Hal ini bisa menjadi penyebab utama yang menjadi kendala bagi korban tindak pidana penganiayaan untuk mendapatkan ganti rugi sebagai haknya.

Proses yang panjang menjadi kendala untuk korban melakukan penggabungan perkara, berkaitan dengan penggabungan perkara pasal 98-101 KUHP. Adapun mekanisme pemberian ganti kerugian terhadap korban kejahatan yakni setelah pelaku dinyatakan bersalah melalui putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pemberian restitusi harus disertai bukti-bukti yang nyata misalnya bukti biaya yang dikeluarkan selama perawatan dan/atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan, fotokopi surat kematian dalam hal Korban meninggal dunia, surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjukkan pemohon sebagai Korban tindak pidana surat keterangan hubungan Keluarga, apabila permohonan diajukan oleh Keluarga dan surat kuasa khusus, apabila permohonan Restitusi diajukan oleh kuasa Korban atau kuasa Keluarga.

Selain proses yang lama dalam wawancara penulis dengan salah satu hakim di Pengadilan Negeri Maros bernama Baryanto S.H, LL.M pada tanggal 16 Januari 2014 memaparkan bahwa faktor ketidaktahuan masyarakat yang menjadi kendala korban tidak mengajukan gugatan ganti kerugian melalui proses litigasi.

Sedangkan menurut hasil wawancara/kuesioner kepada korban penganiayaan terdapat beberapa alasan korban lebih memilih jalur non litigasi.

Tabel 7
Alasan Korban tidak Memilih Jalur Litigasi

No.	Nama Korban	Alasan Korban
1.	Fitrah Ramadhan	Jika melalui pengadilan prosesnya lama, rumit, dsb
2.	Irwansyah	Supaya prosesnya cepat selesai
3.	Wawan	Karena lebih cepat jika musyawarah
4.	Imam Gazali	Karena saya tidak mengerti hukum
5.	Sufardi Hasbullah	Prosesnya cepat
6.	Syahwan Marasabessy	Karena lebih efektif dan cepat
7.	Muh.Fikri	Lebih gampang melalui musyawarah
8.	Andi Hasriadi	Lebih baik musyawarah
9.	Andi Ishak	Supaya tidak berbelit-belit (lambat)
10.	Fatma P	Prosesnya cepat dan tidak berbelit-belit
11.	Rahmawati	Prosesnya cepat dan tidak berbelit-belit
12.	Ilham	Karena dapat mencegah konflik susulan akibat dari ketidakpuasan atas putusan hakim nantinya
13.	Nur Intang	Tidak mengetahui caranya jika melalui pengadilan

14.	Syarifuddin Latif	Tidak berbelit-belit dan kekeluargaan
15.	Ishak	Efektif dan tidak saling memberatkan
16.	Andi Awal Nur	Prosesnya lebih cepat
17.	Najidul Haq	Efektif dan prosesnya cepat
18.	Muhammad Yusuf	Karena tidak menyita waktu yang lama/banyak
19.	Ali Akbar	Karena mementingkan musyawarah
20.	Ilham Rizki	Proses musyawarah lebih cepat

Sumber data diperoleh melalui kuesioner dan wawancara terhadap korban kejahatan.

Salah satu faktor lain yang mempengaruhi masyarakat tidak mengetahui adanya penggabungan perkara yakni tingkat pendidikan.

Tabel 8
Data Tingkat Pendidikan Korban Penganiayaan di Wilayah Maros

No	Nama Korban	Mengetahui adanya Penggabungan Perkara		Tingkat Pendidikan dan Pekerjaan	
		YA	TIDAK		
1.	Fitrah Ramadhan		✓	SMA	Anggota TNI-AD
2.	Irwansyah		✓	SMP	-
3.	Wawan		✓	SMP	Pelajar
4.	Imam Gazali		✓	SMP	-
5.	Sufardi Hasbullah		✓	SMP	Sopir
6.	Syahan Marasabessy		✓	SMA	Mahasiswa
7.	Muh.Fikri		✓	SMP	Pelajar
8.	Andi Hasriadi		✓	SD	Pelajar
9.	Andi Ishak		✓	SMA	Pegawai Swasta
10.	Fatma P		✓	SMA	IRT

11.	Rahmawati		✓	S1	IRT
12.	Ilham		✓	SMA	Mahasiswa
13.	Nur Intang		✓	SMP	IRT
14.	Syarifuddin Latif		✓	SMP	Pelajar
15.	Ishak		✓	SMA	Mahasiswa
16.	Andi Awal Nur		✓	DII	Pegawai BUMN
17.	Najidul Haq		✓	SMA	Mahasiswa
18.	Muhammad Yusuf		✓	SMA	Mahasiswa
19.	Ali Akbar		✓	SMA	Pegawai Swasta
20.	Ilham Rizki		✓	SMA	Pegawai Swasta

Sumber data diperoleh melalui kuesioner dan wawancara terhadap korban kejahatan.

Dari jumlah total ada 20 orang korban, yakni 1 (satu) orang yang tamatan Sekolah Dasar (SD), 7 (tujuh) orang tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP), 10 (sepuluh) orang tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA), 1 (satu) orang pada tingkat Diploma II (DII), dan 1 (satu) orang pada tingkat Strata Satu (S1) dengan presentasi 5% dari tingkat Sekolah Dasar (SD), 35% dari tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), 50% dari tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), 5% dari tingkat Diploma II (DII), dan 5% dari tingkat Strata Satu (S1).

Selain itu, aparat kepolisian yang seharusnya memberikan informasi hukum kepada masyarakat ternyata merasa tidak memiliki kewajiban untuk menginformasikan langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh untuk mendapatkan ganti rugi pada korban. Hal ini berdasarkan hasil kuesioner yang di isi aparat kepolisian Polres Maros yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 9
Kesadaran Polisi Menyampaikan Informasi Penggabungan Perkara Ganti Rugi

No	Nama Penyidik Kepolisian	Partisipasi Penyampaian Informasi Penggabungan Perkara Ganti Rugi
1	Indrawan	Bahwa tidak ada kewajiban bagi penyidik untuk menyampaikan hal tersebut kepada pihak korban/pelapor namun tidak ada salahnya penyidik menyampaikan hal tersebut kepada korban/pelapor biar korban mengetahui hal tersebut.
2	Saharuddin	Sampai saat ini belum ada yang meminta pendapat kepada kami, tidak ada kewajiban menyampaikan kepada korban namun jika ada korban yang meminta pendapat maka akan diberikan penjelasan kepada yang bersangkutan.
3	Firman	Bahwa kewajiban untuk menyampaikan tidak ada namun jika korban bertanya maka akan dijelaskan dan seyogyanya penyidik menyampaikan hal tersebut karena pada umumnya pelapor mengharapkan kerugian yang dialaminya akibat kejahatan dapat dikembalikan/ganti rugi

4	Yanto H	Bahwa untuk berkewajiban menyampaikan tidak ada, namun jika korban bertanya maka akan dijelaskan dan seyogyanya penyidik harus menyampaikan tersebut karena pada umumnya pelapor/korban melaporkan kasus tersebut mengharapkan ganti rugi yang dialaminya akibat kejahatan dapat dikembalikan
5	Ramdan S.H	Tidak ada kewajiban untuk menyampaikan hal tersebut kepada pelapor/korban namun seyogyanya agar korban/masyarakat memahami hal tersebut maka tidak ada salahnya penyidik menyampaikan adanya pasal 98 KUHAP kepada korban agar wawasan masyarakat mengenai hukum menjadi lebih luas
6	Awaluddin K	Selaku penyidik pada dasarnya tidak mempunyai kewajiban akan hal tersebut, akan tetapi dalam hal penanganan perkara penyidik bertindak sebagai petugas yang secara tidak langsung menjadi konsultan hukum bagi pelapor yang memang awam mengenai hukum

7	Safri	Ya, penyidik bisa melakukan pemahaman kepada korban dengan menjelaskan mekanisme , tata cara, aturan untuk melaporkan ganti rugi.
---	-------	---

Sumber data diperoleh dari hasil kuesioner responden penyidik kepolisian

Dari data diatas jelas terlihat bahwa pihak kepolisian tidak berkewajiban untuk memberikan informasi kepada korban/pelapor mengenai adanya upaya ganti kerugian melalui jalur penggabungan perkara. Dari 7 (tujuh) aparat kepolisian 6 (enam) orang berpendapat bahwa pihak kepolisian tidak berkewajiban untuk memberikan informasi kepada korban mengenai adanya ganti kerugian melalui jalur penggabungan perkara dan 1 (satu) orang berpendapat bahwa pihak kepolisian berkewajiban memberikan informasi kepada korban.

Pihak kepolisian hanya memberikan informasi apabila korban menanyakan atau meminta pendapat kepada mereka. Ini merupakan salah satu kendala korban dalam mengupayakan ganti kerugian atas tindak pidana yang dialaminya karena kurangnya informasi yang korban dapatkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab terakhir ini, penulis akan mengemukakan kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Upaya korban penganiayaan mendapatkan ganti rugi atas tindak pidana yang dialaminya lebih memilih jalur non litigasi. Jalur tersebut dipilih oleh korban dengan alasan karena pelaku masih memiliki hubungan keluarga dengan korban. Selain itu, proses non litigasi mempercepat korban mendapatkan ganti kerugian yang sesuai dengan kerugian materil yang diderita korban.
2. Kendala-kendala yang diperoleh korban penganiayaan di Kabupaten Maros dalam mengupayakan ganti rugi yang dialaminya, antara lain:
 - c. Ketidaktahuan masyarakat mengenai adanya Penggabungan Perkara Ganti Kerugian di Tingkat Pengadilan,
 - d. Kurangnya kesadaran partisipasi pihak kepolisian dalam memberikan informasi mengenai cara mendapatkan ganti kerugian terhadap korban melalui Penggabungan Perkara di Tingkat Pengadilan,

- e. Sulit bagi korban karena menyita banyak waktu dan proses yang berbelit-belit dan jumlah ganti rugi yang diputuskan tidak sesuai dengan kerugian yang dialami korban.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah Penulis kemukakan diatas, maka untuk memaksimalkan upaya korban kejahatan untuk mendapatkan restitusi dan meminimalisir kendala-kendalanya, maka penulis mengajukan beberapa saran, antara lain:

1. Pihak Pengadilan perlu mengadakan sosialisasi mengenai Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian kepada masyarakat-masyarakat awam, agar mereka tahu bahwa mereka dapat memperjuangkan haknya di Pengadilan sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap korban.
2. Mempermudah proses penggabungan perkara tentunya akan memudahkan korban untuk mendapatkan haknya dan tidak menyita banyak waktu korban.
3. Penyelesaian dengan jalan kekeluargaan tentunya jauh lebih baik apabila ada kesepakatan tentang jumlah ganti rugi. Maka dari itu, dibutuhkan peran aktif daripihak kepolisian untuk menjadi mediator yang baik.

Saran yang Penulis paparkan di atas, semoga bisa menjadi masukan kepada pemerintah maupun aparat penegak hukum, khususnya

dalam hal menangani kasus tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polres Marospada khususnya dan seluruh Indonesia pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Angkasa. 2004. *Kedudukan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi, Universitas Diponegoro: Semarang.

Dikdik Mansur & Gultom, Elisatris . 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Rajawali Pers: Bandung.

Lamintang dan Theo Lamintang. 2010. *Hukum Penitensier Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta

Lamintang dan Theo Lamintang. 2010. *Pembahasan Kuhap Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Dan Yurisprudensi*. Sinar Grafika: Jakarta

Leden Marpaung. 1997. *Proses Tuntutan Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi*. Rajawali Pers: Jakarta.

Rachmadi Usman. 2012. *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik*. Sinar Grafika: Jakarta.

Rena Yulia. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu: Yogyakarta

Siswanto Sunarso. 2012. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sinar Grafika: Jakarta.

Syahrizal Abbas. 2011. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*. Kencana Pradana Media Group: Jakarta

Peraturan perundang-undangan

Gerry Muhammad Rizki. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kuhap)*. Permata Press: Jakarta.

Soesilo, R. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya*. Politea: Bogor.

Undang-undang Republik Indonesia No 13 tahun 2006 tentang *Perlindungan Saksi dan Korban*.

Undang-undang Republik Indonesia No 39 tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*.

Undang-undang Republik Indonesia No 23 tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*.

Undang-undang Republik Indonesia No 27 Tahun 2004 Tentang *Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi*.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Peraturan Pemerintah No 44 tahun 2008 tentang *Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban*.

Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2002 Tentang *Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat*.

Sumber Internet

Aep Sulaeman Sp.1.*Hak Korban Atas Kerugian Dalam Perkara Pidana* diakses pada tanggal 30/10/13
<http://jurnal.fhunla.ac.id/index.php/WP/article/download/16/2>
pukul 22.00 wita

_____. Victimologi. diakses pada tanggal 26/10/13 pukul 22.30 wita
<http://yuyantilalata.blogspot.com/2010/10/korban-victim.html>)